BANTUL

LAUNCHING INDIKASI GEOGRAFIS BATIK NITIK DIY

Sultan: Produk Karya Asli Daerah yang Berkarakter



Gubernur DIY, Sri Sultan HB X. menandatangani prasasti.

BANTUL (**KR**) - Penetapan batik tulis nitik sebagai kekayaan intelektual komunal indikasi geografis wilayah DIY memberikan harapan baru, sekaligus sebagai simbul *kick off* pengembangan potensi batik tulis nitik, juga dalam ranah bisnis. Dalam kaitan ini, kiranya perlu dirancang konsep aktualitas, mulai dari promosi, sosialisasi dan diversifikasi produk.

Hal tersebut dikemukakan Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, saat melaunching indikasi geografis gebyar batik nitik DIY di Pendapa Kalurahan Trimulyo Jetis Bantul, Selasa (23/11). Acara tersebut dihadiri Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI dan Dirjen IKMA Kementerian Perindustrian RI, para Bupati/Walikota se-DIY dan undangan lainnya.

Menurut Sultan, potensi pengembangan kreativitas dan seni batik nitik berperan penting dalam pengembangan karya budaya batik di DIY. Motif batik nitik yang luwes dapat dikreasi-

kan dengan motif lainnya, melahirkan kreasi-kreasi baru yang lahir dari kreativitas membatik.

"Karena itu Pemda DIY akan terus mendukung perkembangan batik tulis nitik sebagai produk asli daerah yang berkarakter, berkualitas dan pada akhirnya mempunyai reputasi secara nasional dan global. Semoga batik tulis nitik sebagai kreasi karya warisan budaya tak benda mampu menjadi sebuah state of the art yang mendunia. Marilah kita kembangkan bersama semangat golong-gilig tekat nyawiji jumangkah sagatra ing karya, mengembangkan potensi batik tulis nitik

sekaligus memperkokoh makna Yogya Kota Batik Dunia," harapnya.

Sementara Bupati Bantul, H Abdul Halim Muslih, menambahkan, batik tulis nitik merupakan salah satu motif tertua khas Yogyakarta yang dikembangkan oleh kerabat Kraton Yogyakarta dan populer serta berkembang pada era Sri Sultan HB VII (BRAy Brongtokusumo).

Sedangkan pembatikannya dikerjakan oleh pembatik di Kembangsongo Trimulyo. Motif batik tulis nitik terdiri atas ribuan titik yang tersusun dan berukur sedemikian rupa sehingga membentuk ruang sudut dan bidang geometris.

"Walaupun motif batik yang kompleks dan rigid, tapi keindahan yang dimilikinya tidak kalah bila dibandingkan dengan ragam hias lain, seperti Lereng, Ceplok dan lainnya," tuturnya. Pada acara tersebut ditampilkan tari kreasi Didik Nini Thowok dan pameran kreasi pakaian batik. (Jdm)-f

TOLAK WACANA PEMBUBARAN MUI **Tangkap Tikusnya, Jangan Bakar Rumahnya**

BANTUL (KR) - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar dapil DIY Drs HM Gandung Pardiman dengan tegas menolak wacana pembubaran Majelis Ulama Indonesia (MUI) di media sosial dengan tagar 'Bubarkan MUI'.

Munculnya tagar tersebut sebagai imbas Densus 88 menangkap salah satu pengurus MUI, Komisi Fatwa MUI Zain An Najah terkait terorisme. "Usir tikusnya, tapi jangan bakar rumahnya," ujar Gandung Pardiman dalam sambutan diacara Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Graha GPC Karangtengah Imogiri Bantul, Minggu (21/11).

Gandung mengatakan, MUI merupakan warisan Presiden Suharto dengan tujuan menyatukan ulama. Kontribusi MUI bagi bangsa dan negara Indonesia sangatlah besar. Sehingga jika MUI dibubarkan bakal timbul kegaduhan luar biasa. "Saya yakin kalau sampai MUI dibubarkan akan terjadi kegaduhan," ujarnya.

Menurutnya, ketika ada anggota MUI terindikasi separatis ataupun teroris, singkirkan orangnya saja jangan bertindak gegabah membubarkan lembaganya. "Kalau ada tikus separatis atau teroris ya diusir jangan terus membakar rumahnya," jelas Gandung dihadapan ratusan warga masyarakat Bantul.

Gandung menginginkan MUI diisi ulama yang klasifikasinya betul-betul kelas ulama bukan kelas ustadz picisan. "Ustadz picisan itu mau memberikan dakwah atau ceramah saja ada hitung-hitungan honor, wani

PANCASILA, UUD 1945, NKRI DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA
BER

Drs. H. M. GANDU

ANGGO RI

Anggota MPR RI

Gandung dalam sosialisasi 4 pilar di Graha Gandung Pardiman Center.

piro," tegasnya.

Sementara ulama yang betul-betul ulama menurut Gandung adalah orang menghayati betul detail-detail keagamaan, bukan berdasarkan pada materi atau honor. Selain itu Ulama pasti memiliki wawasan kebangsaan berdasarkan Pancasila. "Yakni ulama pancasilais bukan ulama yang ingin memperjuangkan khilafah," jelasnya.

Lembaga MUI sangat dibutuhkan bangsa dan negara Indonesia untuk kepentingan membina umat. Di dalam organisasi tersebut banyak tokoh yang berkompeten. Artinya MUI sebagai wadah berhimpunnya ormas-ormas Islam masih sangat dibutuhkan. "Di dalam MUI terdapat tokoh-tokoh kompeten keilmuannya untuk melakukan pembinaan umat," jelasnya.

Jika memang tuduhan MUI terpapar terorisme, hal tersebut sangat tidak berdasar. Sebab MUI sendiri telah menetapkan fatwa No 3 Tahun 2004 tentang terorisme. "Jadi begini kemarin yang ditangkap Densus tidak ada kaitannya dengan MUI. Sekalilagi saya tegaskan, masak di rumah ada tikus terus rumahnya dibakar. Jelas ini tidak masuk akal," terangnya. (Roy)-f

MURTIGADING BAKAL BEBAS POLITIK UANG Rancangan Perka, Pelaku Terancam Sanksi Sosial

BANTUL (KR) - Money politics (politik uang) tidak ingin mendarah daging di warga desa karena dampaknya sangat merugikan. Karena itu, Kalurahan Murtigading Kapanewon Sanden Bantul bertekad menghilangkan praktek politik uang. Sanksi sosial akan diatur dalam Peraturan Kalurahan (Perka) ten-

Guna mewujudkan hal tersebut, dibentuk Tim 11 Relawan Anti Politik Uang di Kalurahan Murtigading. Mereka dengan disupervisi Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) melakukan konsinyering dan Finalisasi Draf Peraturan Kalurahan

tang Anti Politik Uang.

tentang Anti Politik Uang di kalurahan tersebut di Hotel Ros In, Minggu (21/11).

"Jika nanti disahkan, maka Peraturan Kalurahan (Perka) tentang Anti Politik Uang menjadi yang pertama di Indonesia. Konsinyering dan finalisasi draf Perka menghadirkan seluruh kepala dukuh, perangkat kelurahan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kalurahan Murtigading. Selain itu juga menghadirkan Bagian Hukum Pemkab Bantul," ungkap Koordinator umum KISP, Moch Edeward Trias Pahlevi SIP MIP, kepada KR, Senin (22/11).

Menurut Edward, pembahasan utama dalam acara



KR-Primaswolo Sudjo

Pembahasan draf Perka Anti Politik Uang Kalurahan Murtigading.

ini terkait penentuan dan finalisasi sanksi sosial terhadap pelaku dan penerima politik uang serta pungli di Kalurahan Murtigading yang dituangkan dalam Perka tentang Anti Politik Uang.

Ikut menyampaikan sambutan dalam acara tersebut, Pembina KISP, Bambang Eka Cahya Widodo, Lurah Kalurahan Murtigading, Sutrisno dan pihak Bagian Hukum Pemkab Bantul. (Jon)-f

PASTIKAN BERSIH DARI 'HALINAR'

Kemenkumham DIY Razia Rutan Bantul

BANTUL (KR) - Jajaran Kamtib, Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) DIY melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) hunian warga binaan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Bantul, Selasa (23/11).

Kegiatan Sidak dilaksanakan di Blok Madukoro dan Blok Condrodimuko. Blok tersebut khusus untuk tahanan pengguna Narkoba. Sidak di Blok hunian warga binaan ini untuk memastikan Rutan Kelas IIB Bantul bersih dari HP, Pungli dan Narkoba (Halinar) dan benar-benar dalam keadaan aman dan kondusif.

Razia yang dilakukan tim dari Kanwil Kemenkumham DIY tersebut didampingi Kepala Rutan Kelas IIB Bantul Enjat Lukmanul Hakim, Kepala Kesatuan Keamanan Rutan Jaka Cahyana, Kasubsi Pelayanan Tahanan Joko Sulistiyo serta jajaran Staf KPR Rutan.

Menurut Enjat kegiatan Sidak atau razia terhadap ruang atau blok hunian warga binaan seperti ini sudah rutin di-

lakukan sendiri oleh petugas Rutan Bantul.

Berdasarkan hasil dari razia, disimpulkan Rutan Kelas IIB Bantul bersih dari 'Halinar'. "Kami berharap sinergitas antara Kanwil Kemenkumham DIY dengan Rutan Bantul terkait Sidak ini terus ditingkatkan untuk mewujudkan komitmen bersama dalam mewujudkan Rutan yang bersih dari Halinar maupun pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan Rumah Tahanan," papar Enjat

Sementara hari sebelumnya di Rutan Bantul dilakukam tes urine bagi petugas di Rutan Bantul, sebagai langkah progresif dan upaya serius pemberantasan Narkoba. Tes urine dilakukan secara acak dengan pengambilan 15 sampel urine.

"Tes urine bagi petugas Rutan sudah beberapa kali dilakukan agar jangan sampai ada keterlibatan petugas, baik sebagai pengguna maupun pengedar. Jika ada pasti dikenakan sanksi," pungkas Enjat. (Jdm)-f



Petugas Rutan Bantul jalani tes urine.

